



# BULETIN Parlementaria

NOMOR 942/I/II/2017



## DPR RI SIDAK HARGA CABAI

8

FADLI ZON: TIDAK ADA  
UNSUR MAKAR, MINTA PEMERINTAH SP3

20

KENAIKAN TARIF STNK DAN  
BPKB TIDAK TEPAT

**GRATIS**  
Tidak Diperjualbelikan



Ketua DPR RI, Setya Novanto didampingi Anggota DPR RI meninjau Komoditas cabai

## Ketua dan Sejumlah Anggota DPR RI Sidak ke Pasar Induk Kramat Jati

Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Pimpinan Komisi IV Herman Khaeron dan Siti Hediati Soeharto, Ketua Komisi VIII Ali Taher, serta Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dan Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani melakukan sidak ke Pasar Induk Kramat Jati Jakarta, guna meninjau harga jual cabai dan bawang merah, yang saat ini tengah menjadi isu hangat dan terasa membebani masyarakat.

“ Saya khusus datang pagi ini ke Pasar Induk Kramat Jati bersama dengan Pimpinan Komisi IV Herman Khaeron dan Siti Hediati Soeharto, dan juga Ketua Komisi VIII Ali Taher serta Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dan Anggota Komisi VI Endang Srikarti, untuk melihat langsung harga jual komoditas cabai dan bawang merah. Setelah kita cek Alhamdulillah harga komoditas tersebut telah mengalami penurunan sampai dengan Rp20 ribu. Saat ini harga cabai rawit merah senilai Rp90 ribu per kilogram dan harga

bawang merah seharga Rp16 ribu per kilogram,” ucap pria yang akrab dipanggil Setnov ini di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (12/01).

Ia berharap, agar isu-isu yang berjalan selama ini tidak berkembang menjadi masalah yang besar. Setnov menyampaikan bahwa kenaikan harga yang terjadi beberapa waktu sebelumnya itu, lebih disebabkan oleh faktor cuaca dan distribusi.

“Mudah-mudahan dengan turunnya harga ini tidak menjadi isu-isu besar, karena hal ini sifatnya hanya sementara. Kita tidak

dapat menyalahkan cuaca. Kita berharap ada badan pengelola pangan yang mengatur semua distribusi agar tidak hanya menguntungkan tengkulak, tetapi juga menguntungkan para petani,” ujarnya.

Terkait badan pangan tersebut, Setnov meminta kepada Komisi IV DPR RI dan Badan Legislasi untuk menyoroti hal itu, dan pemerintah juga diharapkan dapat menindaklanjutinya, agar keberadaan badan pangan dapat direalisasikan dan mampu memberikan kontribusi nyata yang memiliki arti yang besar bagi masyarakat. ■

(dgp.mpi) Foto: Jay/br

# DPR RI Minta Australia Usut Tuntas Pelaku Penerobosan KJRI Melbourne

Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan meminta pemerintah Australia mengusut tuntas oknum pria tidak dikenal yang telah menerobos dan mengibarkan bendera Papua Barat di atap gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Australia, pada Jumat (06/01) lalu.

**T**aufik menegaskan, pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di KJRI atau di manapun, yang merupakan teritori spesifik di manapun, DPR RI meminta hal ini agar diusut tuntas.

"Apakah faktor kelalaian atau persoalan sekuriti kurang ketat di KJRI, karena sama saja melecehkan Indonesia," tegasnya, saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/01).

Menurut politisi F-PAN itu, jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi hubungan Indonesia - Australia yang sedang tegang. Ia meminta, Pemerintah Indonesia segera melakukan tindakan pencegahan agar peristiwa itu tidak terulang kembali.

"Sebisa mungkin jika ada seperti itu jangan jadi aksi provokatif di sela hubungan Australia dan Indonesia yang sedang menghangat. Internal kita harus lakukan *action plan* agar hal ini tak terjadi lagi," imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebagaimana diketahui, peristiwa pengibaran bendera OPM itu terjadi saat sebagian besar staf KJRI melaksanakan salat Jumat. Pelaku terindikasi sebagai warga setempat dengan melompati tembok setinggi 2,5 meter.

"Pelaku menerobos halaman gedung apartemen tetangga KJRI sebelum memanjat pagar tembok KJRI yang tingginya lebih dari 2,5 meter," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir.

Polisi Australia sendiri dikabarkan telah meningkatkan pengamanan di seluruh perwakilan RI di negara kanguru itu. Hal ini dilakukan setelah terjadi insiden pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne.

"Kepolisian Federal Australia meningkatkan pengamanan untuk seluruh perwakilan RI di Australia," kata juru bicara KBRI Canberra, Sade Bimantara.

Aksi penyusupan itu tampak sengaja direkam oleh rekan si penyusup. Video penyusupan itu sudah beredar luas. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan protes kepada Australia terkait dengan aksi yang menginjak kedaulatan negara itu dan meminta pelakunya yang sudah berbuat kriminal itu dihukum. ■



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku, Taufik Kurniawan



**PENGAWAS UMUM** Pimpinan DPR RI  
**PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Plt. Sekjen DPR RI)  
**WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN)  
**PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)  
**PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**WK. PIMPINAN REDAKSI** Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega  
**REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah  
**ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari  
**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
 Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



## PENERBITAN & DISTRIBUSI

**PIMPINAN PENERBITAN** Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)  
**WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi)  
**STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurrahman, Mujiono  
**SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif  
 Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNG BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

## Pemerintah Diminta Tuntaskan Masalah dengan Australia

Ketua DPR RI Setya Novanto meminta Pemerintah RI mengambil tindakan tegas dalam menangani permasalahan Indonesia dengan Australia. Harapan ini dia sampaikan menanggapi insiden pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne, beberapa waktu yang lalu.

**P**adahal masalah insiden pelecehan Pancasila sebagai simbol negara pun masih hangat tersiar. Jadi sudah seharusnya pemerintah Indonesia memberikan perhatian untuk menangani dua masalah tersebut agar kedepan hubungan kedua negara bisa segera membaik. "Untuk itu saya rasa harus segera diinvestigasi supaya tidak ada masalah - masalah lagi ke depannya," tandas Novanto kepada awak media di Jakarta, Senin (09/01).

Novanto meminta pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Australia untuk menginvestigasi peristiwa pengibaran bendera OPM di kantor KJRI Melbourne. Selain menginvestigasi, Novanto meminta agar pelaku dihukum.

Menurutnya tindakan itu melanggar konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 mengenai hubungan

diplomantik. "Pihak Australia harus mengakui bahwa masalah hubungan diplomatik juga menghormati aset-aset negara termasuk KJRI," papar Novanto.

Dia menyampaikan, telah menghubungi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan meminta diberi informasi terbaru perihal kasus pengibaran bendera OPM ini. "Saya tadi sudah telepon Menlu, minta segala informasinya dan saya mengapresiasi kepada Menlu yang telah melakukan langkah-langkah yang cepat. Saya rasa ini harus ditindaklanjuti terus," imbuhnya.

Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri mengancam



Ketua DPR RI, Setya Novanto

pelanggaran tersebut dan telah mengirimkan protes kepada pemerintah Australia. Pemerintah RI meminta agar pelaku ditangkap dan dihukum dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. ■

(eko.npp). Foto: Anadibr

## Jalankan Roda Demokrasi dengan Baik

Demi menjaga dinamika demokrasi yang harmoni, Ketua DPR RI Setya Novanto menyambut baik pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam sambutan HUT ke-44 PDI Perjuangan. Megawati menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo.

**N**ovanto berpendapat, demokrasi memang harus dijalankan dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Presiden Joko Widodo adalah Presiden pilihan rakyat, hasil Pemilu yang konstitusional. Karena itu, jika mengganggu apalagi berniat menjatuhkan Presiden yang dipilih secara konstitusional harus dicegah dan lawan.

"Sebagai Ketua DPR RI saya mengajak

seluruh pihak untuk menjalankan roda demokrasi dengan baik. Menghormati pilihan rakyat dan menjunjung tinggi pilihan tersebut, untuk mewujudkan kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia," papar Novanto di Jakarta, Selasa (10/01).

Megawati juga menyatakan akan bersedia membantu Presiden Joko Widodo saat dibutuhkan, juga menawarkan bantuan

saat Presiden Joko Widodo diganggu oleh pihak-pihak tertentu, yang tentunya akan mencederai demokrasi di Indonesia. "Sebagai Rakyat Indonesia, saya mengajak kepada kita semua untuk mencegah cara-cara yang tidak demokratis dan inkonstitusional dalam memaksakan kehendak," ujar Novanto.

Dia menyampaikan, akan selalu mengawal Pemerintahan Joko Widodo.



Suasana Rapat Paripurna DPR RI

Novanto juga memandang Presiden Joko Widodo telah menjalankan amanat rakyat dengan baik. Presiden Joko Widodo telah menjalankan aspirasi rakyat dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan program-program kerakyatan yang dicanangkannya.

"Sebagai bangsa yang beradab kita harus mendahulukan kepentingan bersama, mendahulukan cara-cara yang beradab dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap Novanto.

Dia mengatakan tidak ada alasan untuk meragukan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tidak ada alasan sedikitpun untuk menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo gagal menjalankan pemerintahan. Joko Widodo adalah Pilihan Rakyat yang harus dibela dan dijaga. ■

(eko), Foto: Kamlibr

## Dewan Nilai Aparat Kepolisian Melakukan Abuse Of Power

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menilai aparat kepolisian telah melakukan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) terkait penanganan orang-orang yang dituduh makar. Indikatornya, ada banyak perbedaan penanganan kepolisian dalam proses pemeriksaan kasus makar dengan penistaan agama.

“ Kami menerima pengaduan serupa dari putri kandung Proklamator RI, Rachmawati Soekarnoputeri, dan kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, terkait penanganan pemeriksaan tertuduh makar dengan cara interogasi sebagai *abuse of power*,” ujar Fadli saat menerima audiensi Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/01).

Menurutnya, carut-marut situasi kehidupan berbangsa bernegara dewasa ini tercoreng dengan adanya agenda terselubung asing untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Senada dengan Fadli, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah yang mendampingi Fadli bersama Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

Syafii, mengungkapkan kebingungannya dengan aparat kepolisian yang menerapkan pasal-pasal makar yang sudah tidak ada.

"Saya khawatir tindakan kepolisian menakut-nakuti rakyat justru memunculkan perlawanan yang sesungguhnya, dan saya yakin Presiden Joko Widodo tidak menginginkan hal itu," ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Syihab, mengungkapkan kegaluannya dengan sikap kepolisian yang diskriminasi terhadap ulama yang ikut membangun NKRI.

"Aksi Bela Islam I (14/10), II (4/11), III (2/12) tahun 2016, yang dilaksanakan secara damai merupakan

murni gerakan hukum dan bukan aksi makar. Tetapi ada gerakan sistematis dan massif yang mendiskredit seolah-olah anti-kebhinnekaan dan NKRI termasuk pidato pimpinan partai politik baru-baru ini," ujarnya didampingi sejumlah tokoh GNPF MUI termasuk ustadz Bachtiar Nasir. ■

(eko), Foto: Andri/br

## Paripurna DPR RI Lantik 9 Anggota PAW

Sidang Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016 - 2017 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon melantik sembilan Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) Periode 2014-2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/01).

**K**esembilan anggota PAW tersebut masing-masing yaitu, Bara Krhisna Hasibuan menggantikan Yasti Soepredjo Mokoagow dari Fraksi PAN dapil Sulawesi Utara, Ibnu Munzir menggantikan Enny Anggraeny Anwar dari Fraksi Golkar dapil Sulawesi Barat.

Selanjutnya, Ace Hasan Syadzily menggantikan Andika Hazrumy dari Fraksi Golkar dapil Banten I, Bambang Heri Purnama menggantikan Indro Hananto dari Fraksi Golkar dapil Kalimantan Selatan I dan Wasista Bambang Utoyo menggantikan Dodi Reza Alex Noerdin dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Selatan I.



*Suasana Pelantikan 9 Anggota PAW*

Sementara, 4 PAW lainnya berasal dari Fraksi Demokrat antara lain Hartanto Edhie Wibowo menggantikan Wahidin Halim dapil Batam III, Anita Jacoba Gah menggantikan Jefirstson Riwu Kore dapil Nusa Tenggara Timur II, Ihwan Datu Adam menggantikan

Adji Farida Padmo Ardans dapil Kalimantan Timur dan Muhammad Afzal Mahfuz menggantikan Salim S. Mengga dapil Sulawesi Barat.

Pembacaan sumpah janji pelantikan dipandu Ketua DPR RI Setya Novanto. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,"

serempak kesembilan Anggota Dewan yang dilantik tersebut.

Setelah pembacaan sumpah selesai, pimpinan DPR RI secara bergantian memberikan salam tanda ucapan selamat kepada kesembilan Anggota Dewan PAW periode 2014-2019. ■

*(ama, sl), Foto: Kemas/Inf*

## Masyarakat Eks Timtim Minta Direlokasi

Masyarakat eks Timor Timur (Timtim) di Kupang, NTT, meminta direlokasi ke tempat khusus, bahkan ke sebuah pulau tertentu di Maluku. Sejak memilih bergabung dengan Indonesia usai referendum tahun 1999, masyarakat eks Timtim ini belum memiliki tempat tinggal.

**D**emikian mengemuka saat Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menerima delegasi eks masyarakat Timtim di ruang kerjanya, Rabu (11/1). Fadli berharap, sebaiknya masyarakat eks Timtim mengajukan usulan ke Komisi V DPR RI untuk dibuatkan rusunawa. Bila harus direlokasi ke suatu pulau, itu perkara yang tidak mudah. Semua tuntutan masyarakat eks Timtim perlu dikaji lagi untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik.



*Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon menerima delegasi eks masyarakat Timtim*

Sementara delegasi masyarakat Timtim sendiri mengusulkan agar direlokasi ke Pulau Wetar, tepatnya di ujung barat daya Provinsi Maluku. Pulau ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. "Pindah ke pulau tidak mudah. Yang paling mungkin adalah ditempatkan di rumah layak huni," imbuh Fadli.

Di hadapan Fadli, delegasi eks Timtim ini mengaku menjadi

masyarakat kelas 2 di Kupang, karena mereka adalah pendatang. Situasi ini membuat mereka tak nyaman, karena kesejahteraannya juga terganggu. Selama ini, masyarakat eks Timtim masih menumpang di rumah-rumah saudara atau teman yang mereka kenal. Setidaknya ada 240 ribu jiwa masyarakat eks Timtim yang tidak memiliki tempat tinggal.

Fadli sendiri sempat

mempertanyakan, apakah keinginan relokasi ke pulau Wetar merupakan kehendak semua masyarakat eks Timtim. Sekali lagi, ia mengimbau agar tuntutan tersebut didetailkan kembali untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif. Mesti ada tim advokasi yang menjembatani semua tuntutan masyarakat eks Timtim ini, agar bisa segera direalisasikan. ■

(mb), Foto: Kresna/br

## DPR RI Berharap Pilkada Serentak Berlangsung Damai

Ketua DPR RI Setya Novanto berharap pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilakukan pada 15 Februari 2017 dapat berjalan dengan lancar. Hal itu diungkapkan dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang III tahun 2016-2017 pada Selasa, (10/01) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Terkait pelaksanaan Pilkada Serentak gelombang kedua yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 di 101 daerah, DPR RI berharap agar dapat terlaksana secara aman, lancar dan tertib,” ujar Setnov, sapaan akrabnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengingatkan pemerintah agar dapat menjadi wasit dalam pesta demokrasi tersebut. Ia pun juga berharap netralitas aparat dapat terjaga. "DPR RI juga berharap pemerintah dapat menjadi wasit dan menjaga netralitas aparat di daerah," ujarnya.

Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara pemilu, Setya Novanto juga mengingatkan kepada kedua lembaga tersebut dapat melaksanakan pilkada secara profesional dan sesuai dengan



Pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang III tahun 2016-2017

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"DPR RI juga menghimbau pada penyelenggara pilkada yakni KPU dan Bawaslu agar melaksanakan pilkada secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pada 15

Februari 2017 akan diselenggarakan pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia dengan rincian pilkada ditingkat provinsi sebanyak 7 pilkada, di tingkat kabupaten sebanyak 76 pilkada dan ditingkat kota sebanyak 18 pilkada. ■

(hs.mp), foto : iwan armanias/br

## Fadli Zon : Tidak Ada Unsur Makar, Minta Pemerintah SP3

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon berpendapat tidak ada terpenuhi unsur makar pada kasus dugaan makar terhadap Rachmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan yang ditangkap menjelang aksi damai tanggal 1 Desember 2016. Ia juga akan minta Presiden, Kapolri dan Kapolda untuk menutup perkara ini (SP3).

“ Saya berpendapat tidak ada terpenuhi unsur makar disitu, dan ini pasal yang seharusnya betul-betul dibuat dengan hati-hati dan harus juga diperhatikan dengan hati-hati tidak sembarangan. Kalau tidak ini akan membuat demokrasi kita terancam, karena negara kita bukan negara polistate,” kata Fadli saat menerima audiensi Rachmawati Soekarno Putri, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan kuasa hukum para terduga makar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/01).

Kemudian, sebagai Pimpinan DPR RI seperti halnya menerima audiensi dari masyarakat lainnya, ia akan segera meneruskan apa yang disampaikan Rachmawati dan kawan-

kawan yaitu menutup perkara ini kepada Presiden, Kapolri dan Kapolda.

"Saya kira ini harus ada satu langkah, perkara ini ditutup. Dan permintaan daripada Bapak-bapak dan Ibu-ibu akan segera kami sampaikan kepada Presiden dan juga kepada Kapolri, Kapolda agar masalah ini tidak berlarut-larut dan energi kita sebagai bangsa juga tidak tersedot oleh perkara yang sebetulnya omong kosong, kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat," papar politisi dari Gerindra ini.

Menurutnya, apa yang disampaikan Rachmawati dan para kuasa hukum jelas sekali bukti-bukti masih sangat sumir dan bahkan dalam persoalan diksi, etimologi kata makar saja orang bisa berbeda interpretasi.

"Masa orang berniat bisa dikatakan makar, saya kira apa yang disampaikan Ibu Rachmawati tadi disampaikan oleh hati beliau apa yang terjadi di peristiwa tahun 1965 dan sebagainya dimana ada kekerasan fisik, senjata, itu jelas makar. Disini senjatanya mana, tidak ada senjata, ini penyampaian aspirasi bahkan

hukum.

"Karena ini kami baru mendengar dari sepihak dimana proses interogasinya seperti sebuah dagelan. Dan saya kira itu menunjukkan ketidakprofesionalan, dan kita tidak ingin ada polisi yang tidak profesional," tukasnya.

"Karena polisi itu pengayom dan pelayan masyarakat. Jadi ini perlu juga diketahui publik, apakah ini perbuatan oknum atau memang menjadi suatu *policy* dan ini saya kira menjadi bagian dari tugas di DPR RI untuk melakukan pengawasan," tambahnya.

Apakah kemudian ada unsur pelanggaran hak asasi manusia termasuk didalam hal ini penahanan tanpa proses BAP, lanjut Fadli, dan kalau benar tadi apa yang disampaikan pengacara dalam kasus Sri Bintang Pamungkas, Zamran dan Ruslan.

Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan yaitu tentang proses yang begitu cepat, tidak ada suatu kehati-hatian. Dalam kesempatan itu, Fadli menyangkan, kenapa tidak ada satu gelar perkara yang terbuka, yang transparan terhadap kasus dilakukan Saudara Ahok, dalam hal ini polisi sangat hati-hati mengistimewakan Saudara Ahok untuk menjadikan dia kemudian tersangka.

Tetapi tidak dalam kasus ini, begitu cepat, tiba-tiba dan ada semacam satu ketergesaan yang bisa membuat tindakan itu profesional bahkan bisa dianggap *abuse of power* atau melanggar hukum itu sendiri. Dan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum. ■



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon didampingi sejumlah Anggota DPR RI bersama Rachmawati Soekarno Putri

penyampaian aspirasinya ke tempat yang tepat yaitu ke MPR, ke DPR RI dan sebagainya yang merupakan rumah rakyat yang dijamin konstitusi," jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa konstitusi kita jelas mengatakan baik konstitusi UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 atau perubahannya, itu ada jaminan hak untuk berbicara, hak untuk berkumpul, hak untuk berserikat, dan hak untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Anggota Komisi III Supratman Andi Agtas dan Wenny Warrouw, Anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat ini meminta data ataupun petisi-petisi yang lengkap sebagai bahan untuk mendalami adanya dugaan melanggar



## Kualitas Beras Bulog Rendah

Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani mengungkapkan, kualitas beras yang ada di gudang-gudang Bulog berkualitas rendah. Setiap kali sidak ke Bulog, Endang kerap menemukan beras yang sudah menghitam, bahkan berketu.

“ Anggota F-PG DPR RI itu menyampaikan hal tersebut kepada Parlementaria, Rabu (11/1). Kualitas beras Bulog rendah, karena Bulog sendiri tak mampu membeli beras dengan kualitas tinggi. Akhirnya, ada beras yang mengendap sampai tiga bulan di Gudang, sehingga berubah warna kehitaman dan berketu,” ucap Endang.

Politisi dari dapil Jateng V itu, kerap kali



Anggota Komisi VI DPR RI, Endang Srikarti Handayani

sidak sendiri ke Bulog. Terakhir, ia sidak ke Bulog di Boyolali. Endang mengaku miris melihat kualitas beras yang begitu rendah. Dia banyak mengambil sampel beras dari Bulog. Ada yang butirannya sudah pecah, ada pula yang sudah berubah warna.

Bulog membeli gabah petani, sambung Endang,

biasanya hanya Rp3.000-Rp4.000 per kg. Sementara tengkulak membelinya dari petani bisa Rp4.100-Rp4.300 secara tunai. Para tengkulak memberi harga jauh lebih tinggi daripada harga yang dipatok Bulog. Akhirnya, Bulog hanya kebagian gabah dan beras kualitas rendah.

Namun, kini keberadaan BUMDes cukup membantu petani dan masyarakat miskin di pedesaan. Masyarakat sudah tak berharap lagi beras murah dari Bulog. Mereka kini berharap dari BUMDes yang memberi layanan kebutuhan masyarakat dengan baik, termasuk beras dengan kualitas baik. ■

(mb), Foto: Rumi/hr

## Komisi I DPR RI Desak Australia Usut Tuntas Pengibaratan Bendera OPM

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz berharap kasus pengibaratan bendera OPM di kantor kedutaan besar Indonesia diusut tuntas. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan sesaat sebelum memasuki ruang sidang Paripurna, Senayan Jakarta (10/1).

“ Saya berharap pemerintah Australia mengusut tuntas siapa sebenarnya yang ada di balik kasus pengibaratan bendera OPM tersebut. Dengan tegas disini saya meminta pemerintah Australia menghormati kedaulatan Indonesia, dan mencoba menghentikan setiap aksi-aksi yang memang dapat mencederai kedaulatan Indonesia,” ungkap Meutya.

Dilanjutkan politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, sejauh ini ia melihat pemerintah sudah cukup tegas atas kasus ini. Hanya saja menurutnya, perlu diintensifkan lagi



Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz

komunikasi dengan kedutaan besar Australia. Agar Australia juga betul-betul menganggap bahwa ini masalah serius untuk kedua Negara. Dan bukan menganggap insiden ini sebagai peristiwa yang kecil. Terlebih lagi dalam waktu berdekatan terjadi peristiwa sebelumnya antara TNI dengan

Militer Australia.

"Jadi saya berharap peristiwa-peristiwa ini ditanggapi dengan hati-hati dan keseriusan. Diusut tuntas dan diambil tindakan tegas terhadap pelaku," tegasnya.

Meski demikian, ia berharap tidak ada ketegangan yang berlebihan dari hubungan kedua Negara ini. Karena bagaimanapun juga Indonesia dan Australia adalah Negara tetangga. Sehingga Meutya masih berkeyakinan bahwa Australia akan beritikad baik. Hal itu juga terlihat dari permintaan maaf pemerintah Australia terkait pengibaratan bendera Bintang Kejora tersebut.

Ia juga berharap, pemerintah Australia ke depan dapat melakukan proteksi terhadap kantor Kedubes Indonesia. Sebagaimana juga pengamanan super ketat yang dilakukan Indonesia terhadap kedutaan-kedutaan besar Negara lain yang ada di Indonesia jika terjadi demonstrasi di dalam negeri. ■

(Ayu), Foto: Arief/hr

## Perlu Dilembagakan, Setiap Kunker Diawali RDP dengan Akademisi dan LSM

Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Ahmad Basarah menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan Tim dan anggota Komisi Dapil Sulsel Akbar Faisal yang mengundang kalangan akademisi, penggiat anti korupsi dan HAM sebelum melakukan pertemuan dan raker dengan aparat penegak hukum.

**D**i sela-sela kunjungan kerja ke Sulsel yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman Senin (19/12), Tim ini mengundang Dekan FH Universitas Hasanuddin dan FH Universitas Muhammadiyah, LSM penggiat anti korupsi dan penegakan hukum diantaranya PBHI Makasar.

Menurutnya, kunjungan kerja seperti ini di luar gedung dalam tugas pengawasan, dan sebanyak 55 anggota Komisi III tidak mungkin bisa menjangkau dan mengawasi semua mitra kerjanya. Tidak mungkin mengawasi seluruh Polda, polsek sampai polres di seluruh Indonesia.

Begitu juga pengawasan terhadap kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri serta semua mitra kerja. "Forum ini melengkapi tugas Komisi III dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terkait raker yang akan dilaksanakan dengan mitra kerja Komisi III. Kunker ini bukan seremonial belaka," tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Namun demikian, Basarah berharap Komisi III dapat melembagakan dengan Pimpinan Komisi III lainnya, agar di setiap kunker diawali dan mendengarkan lebih dulu pendapat dan usulan informasi dari masyarakat yang akan melengkapi data-data pada saat rapat kerja dengan pemerintah.



Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Basarah

"Inilah bentuk negara Pancasila dimana antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat terutama kelompok penggiat anti korupsi dan LSM yang paradigma biasanya berpraduga terhadap lembaga negara termasuk DPR RI. Kadang-kadang miris juga DPR RI itu digeneralisir disangka jelek. Saya prihatin orang-orang baik seperti Pak Benny (Ketua Tim Kunker) ini tentu merasa kecil hati kalau lembaga ini tidak dipercaya masyarakat," tambahnya.

Bahkan bentuk kunker semacam ini, kata Wasekjen PDI Perjuangan ini, akan membangun kepercayaan masyarakat dengan lembaga-lembaga negara. Siapa lagi yang

dipercaya masyarakat kalau tidak terhadap lembaga-lembaga negara yang resmi. Untuk acara selanjutnya bisa dikemas lebih baik lagi, laporan-laporan yang disampaikan lebih cermat, akurat dan lebih obyektif, apalagi dilengkapi data-data dan dokumen pendukungnya.

Ketua Tim Benny Harman sependapat dengan Basarah, semua informasi yang disampaikan hendaknya dilengkapi dengan data-data dan dokumen yang lengkap supaya mempunyai dasar yang kuat untuk diperjuangkan dalam rapat kerja dengan pemerintah.

Salah satu masukan dari Dekan FH Unhas Farida Patippi antara lain kasus pengadaan tanah untuk bandara Toraja, kasus kasus tanah dan SDA serta penguasaan tanah pesisir. "Perlu ada regulasi dari kementerian untuk memberi penegasan terhadap status tanah-tanah yang digarap seperti ini walaupun sudah ada keputusan menteri bahwa kewenangan penyerahan tanah berada di Pemda. Banyak masalah seperti Central Poin Indonesia (CPI) sebab masyarakat yang menggarap dan mengerjakan terus menerus tetap dianggap penguasaan masyarakat seterusnya. Barangkali perlu pengaturan lebih jelas," ia menambahkan. ■

(mp) Foto: Mactur/br

## Efektivitas Humas Harus Ditingkatkan Untuk Respon Hoax

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan efektivitas fungsi keHumasan (Hubungan masyarakat) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada semua K/L, kantor gubernur, kantor bupati dan kantor walikota harus segera ditingkatkan. Hal tersebut menanggapi lemahnya manajemen komunikasi pemerintah merespons berita *hoax*.

“ Untuk mengatasi lemahnya manajemen komunikasi pemerintah, sudah waktunya bagi Presiden Joko

Widodo perlu untuk mendorong atau mewajibkan semua Kementerian dan Lembaga (K/L) Negara, para gubernur,

Bupati dan Walikota untuk lebih sigap merespon *hoax* atau berita bohong. Kekacauan bisa ditangkal dan tertib umum akan terjaga jika aparat pemerintah pusat dan daerah sigap meluruskan berita bohong," katanya dalam rilis yang disampaikan ke Parlemen, Senin (09/01).

Untuk itu, efektivitas fungsi kehumasan (Hubungan masyarakat) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada semua K/L, kantor gubernur, kantor bupati dan kantor



Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo

walikota harus segera ditingkatkan. Biro Humas dan PPID tidak boleh lagi pasif, melainkan harus pro aktif.

Saat ini, kata politisi Partai Golkar ini, puluhan berita bohong dan informasi palsu beredar setiap detiknya melalui sarana media sosial (Medsos). Berita yang benar dan akurat bercampur dengan *hoax* atau gosip, dan menyebar dengan sangat cepat dan tak terkendali.

"Perkembangannya sudah sangat memprihatinkan, karena berpotensi menyesatkan pengertian atau pemahaman

masyarakat terhadap ragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Bahkan, bisa memicu konflik horizontal," tukasnya.

Karena terkait erat dengan hak publik memanfaatkan Medsos, lanjutnya, penyebaran *hoax* menjadi sulit ditangkal. Membentuk sebuah institusi untuk mencegah atau menangkal *hoax* tidaklah fisibel. "Satu-satunya langkah yang cukup efektif menangkal *hoax* adalah kesigapan merespons berita bohong itu dengan menyebarkan berita yang benar dan informasi yang akurat," tandasnya. ■

(c), Foto: Anandri/br.

## Pembentukan Badan Siber Nasional Jangan Kontraproduktif

Pembentukan Badan Siber Nasional harus benar-benar memanfaatkan sumberdaya yang sudah ada. Baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana prasarana (sarpras) yang telah tersedia di sejumlah instansi dan lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

“Jangan sampai pembentukan badan baru ini kontraproduktif dengan semangat pemerintah yang telah melakukan moratorium terhadap lembaga-lembaga negara *non structural*,” demikian ditegaskan anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi Selasa (10/1) di Jakarta, menanggapi rencana Pemerintah Membentuk Badan Siber Nasional.

Politisi PPP ini menyambut baik rencana pemerintah membentuk Badan Siber Nasional yang bertujuan untuk memberi proteksi bagi warga negara baik dalam urusan transaksi elektronik, bisnis termasuk di media sosial. Menjamurnya informasi palsu (*hoax*) yang menjurus pada fitnah akan mengganggu hubungan harmoni sesama warga bangsa.

Dalam kaitan itu, lanjut Thomafi, integrasi SDM maupun sarana prasarana menjadi hal mendesak yang perlu segera dilakukan oleh badan ini. Selain juga, peningkatan kapasitas SDM agar dapat menjawab tantangan ruang siber yang semakin kompleks. Pemerintah juga perlu memberdayakan SDM dari unsur masyarakat, terutama para ahli dan praktisi siber yang jumlahnya cukup banyak agar

turut diberdayakan secara optimal.

Menurutnya, tugas Badan Siber Nasional diharapkan juga harus masuk dalam upaya meneguhkan semangat NKRI dan pengawalan ideologi Pancasila. Mengingat di saluran dunia maya, tidak sedikit yang beredar upaya *distorsi* informasi dan *distrust* terhadap ideologi negara. Dalam konteks ini, badan ini ke depan bisa melakukan sinergi dengan lembaga lain seperti Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) termasuk dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).

Menanggapi adanya kekhawatiran sebagian pihak atas keberadaan lembaga ini yang dinilai bakal menekan pihak yang bersebarangan dengan pemerintah harus dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan posisi lembaga ini. "Saya mengusulkan agar badan ini menjadi badan pelaksana bukan sebagai badan regulator. Kewenangan sebagai regulator tetap berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Badan ini juga harus dalam pengawasan DPR RI dalam rangka



Anggota Komisi I DPR RI, Arwani Thomafi

mewujudkan upaya *checks and balances*," tegas anggota Dewan dari Dapil Jateng ini.

Akhirnya dia berharap, sejalan dengan pembentukan badan ini agar pemerintah juga mempertimbangkan untuk membangun Sistem Keamanan Siber Nasional (National Cyber Security System), termasuk dukungan regulasi berupa perundang undangan misalnya mengajukan RUU Keamanan Siber Nasional. Dengan cara ini, pemerintah meletakkan dasar yang baik dan merespons perkembangan zaman khususnya di era *new media* saat ini. ■

(pmp), Foto: Jhuar/br.

## PHRI Bali Diminta Cari Terobosan Promosikan Hotel

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali diminta mencari terobosan baru untuk mempromosikan hotel-hotel secara mandiri di Bali.

Hal tersebut disampaikan Anggota Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI ke Provinsi Bali Ridwan Hisjam, menanggapi pernyataan PHRI Bali bahwa tingkat hunian hotel (occupancy) di Bali hanya mencapai 50%.

"Menurut PHRI ini merupakan hal yang perlu diperhatikan pemerintah pusat, karena investasi yang ada disini terlalu lama untuk kembali kalau hanya 50%," kata Ridwan usai pertemuan tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pewayan di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, beberapa waktu lalu.

"Kami tadi mengusulkan kalau memang itu masalahnya, masalah promosi, maka PHRI Bali harus mencari untuk mempromosikan hotel-hotel di Bali secara mandiri tidak tergantung pada promosi



Anggota Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam

hotel atau promosi pariwisata yang dilakukan Kementerian Pariwisata RI," ungkapnya.

Karena, lanjut politisi Partai Golkar ini, Kementerian Pariwisata bertanggung jawab terhadap promosi seluruh daerah-daerah wisata yang ada di Indonesia terutama 10 destinasi baru yang sudah

menjadi andalan pemerintah.

Tapi, kata Ridwan, menurut PHRI yang menjadi masalah adalah infrastruktur, terutama pintu masuk ke Bali sangat terbatas dengan terbatasnya Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.

"Bandara ini menurut *General Manager* Angkasa Pura Bali sudah cukup besar bahkan bisa menampung 25 juta orang per tahun. Tetapi ternyata itu masih kurang. Sehingga ini memang harus ada terobosan baru dari pemerintah di dalam mengembangkan Bali sebagai destinasi andalan negara kita," paparnya.

Oleh karena itu, menurut Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini, pengembangan Bandara Udara harus dipercepat. "Paling tidak di tahun 2017 harus segera dimulai pembebasan tanah dan sekaligus pelaksanaan pembangunannya," jelasnya.

Menurutnya, kalau itu bisa dijalankan maka *occupancy* hunian hotel di Bali bisa mencapai 70% akan sangat baik. ■

(6). Foto: Suati/br.

## Kasus Terbakarnya Zahro Express Harus Tuntas

Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan dan infrastruktur, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap kasus terbakarnya kapal wisata Zahro Express di perairan Kepulauan Seribu pada Minggu (01/01) lalu. Penyelesaian kasus Zahro Express harus tuntas, harus ditemukan penyebab utamanya, dan mencari pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kasus ini. Demikian disampaikan dalam rilis yang diterima Parlemen pada Jumat (06/01).

Penuntasan kasus ini harus dilakukan dengan serius dan menyeluruh, agar kejadian yang sama tidak terulang di kemudian hari. Kasus ini, menurutnya, menunjukkan carut-marutnya pengelolaan angkutan perhubungan laut di Indonesia.

"Kasus ini harus dijadikan momentum perbaikan pengelolaan angkutan laut di negara kita ini, apalagi Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan adanya tol laut. Kalau kondisinya seperti ini, siapa yang mau percaya pada angkutan perhubungan laut kita," ujarnya.

Anggota DPR RI dari F-PKB ini menyoroti bobroknya pengelolaan angkutan perhubungan laut yang ditunjukkan dalam kasus terbakarnya Zahro Express. Mulai dari manifes penumpang yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang sesungguhnya yang naik ke kapal, kelayakan kapal yang katanya baru beroperasi pada 2013 dan memiliki sertifikat kelayakan perjalanan tetapi mengalami kebakaran dan tidak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai. Ditambah lagi dengan surat ijin pelayaran yang dikeluarkan



Anggota Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

otoritas pelabuhan tanpa dibarengi dengan pengecekan dan pengawasan kondisi kapal maupun penumpang.

"Tragedi terbakarnya Zahro Express telah menewaskan 23 orang dan entah berapa lagi rakyat Indonesia yang hilang di perairan itu, kita tidak mampu mendata karena dokumen administrasi yang dimiliki kapal tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Ini peringatan bagi pemerintah, karena keselamatan masyarakat yang menjadi penumpang adalah tanggung jawab pemerintah," ungkap Neng Eem.

Karena itu dia mendukung sepenuhnya keinginan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang lima kerabatnya menjadi korban dalam kasus Zahro Express, untuk membentuk Panitia Khusus atau Pansus guna menuntaskan kasus terbakarnya kapal wisata ini. "Pembentukan Pansus menjadi penting untuk menjamin penuntasan kasus ini sebagai evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah dalam menyelenggarakan angkutan perhubungan laut yang benar dan selamat," jelas Neng Eem.

Seperti diketahui kapal wisata Zahro

Express hangus terbakar saat beranjak dari pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Hingga saat ini tercatat sebanyak 23 orang meninggal akibat dari kebakaran kapal wisata ini. Selain itu, belasan penumpang luka-luka dan jumlah penumpang yang hilang masih belum jelas. Manifes KM Zahro Express mencatat hanya 100 penumpang, padahal data yang lain menyebutkan kapal wisata ini diisi penumpang sebanyak 247 orang dari kapasitas kapal yang katanya mencapai 285 penumpang. ■

(b), Foto: Nengfurgjbr

## DPR RI Harapkan Investasi dan Perdagangan Korsel Ditingkatkan

Ketua DPR RI Setya Novanto menyambut baik kunjungan Ketua Parlemen Korea Selatan Chung Sye Kyun. Dalam pertemuan tersebut, ia mengatakan kunjungan ini memiliki arti penting bagi upaya peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan

Menurutnya, Korea Selatan merupakan mitra penting di bidang ekonomi dan perdagangan sehingga nilai perdagangan kedua negara perlu ditingkatkan kembali. Mengingat, selama beberapa tahun terakhir neraca perdagangan kedua negara mengalami penurunan. "Kami mendorong pemerintah masing-masing untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi," ujar Novanto saat Konferensi Pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/01).

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menyebutkan total volume perdagangan kedua negara tahun 2014 sebesar 22,5 miliar US dollar, tahun 2015 sebesar 16,1 miliar US dollar, dan pada tahun 2016 (dari bulan Januari sampai Oktober) tercatat sebesar 11,2 miliar US dollar.

"Kami berharap nilai investasi Republik Korea di Indonesia dapat ditingkatkan kembali. Nilai investasi



Pimpinan dan Anggota DPR RI bersama Delagasi Ketua Parlemen Korsel

Republik Korea sampai triwulan ke-III 2016 di Indonesia tercatat sebesar 272,3 juta US dollar untuk 499 proyek. Besaran investasi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2015 yang mencapai 1.213,5 juta US dollar untuk 2.329 proyek," jelas Novanto.

Meskipun demikian, ia mengapresiasi investasi perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan di Indonesia, seperti POSCO, Hankook Tire, Samsung, dan lain-lain, karena

turut berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan ekonomi Indonesia. "Peningkatan hubungan antarparlemen, antara DPR RI dan Majelis Nasional Republik Korea, perlu terus dilakukan. Untuk itu, DPR RI telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI Parlemen Republik Korea sebagai bagian dari upaya untuk mendukung penguatan kerja sama dan persahabatan antara Indonesia dan Republik Korea," mantapnya.

Sementara, Ketua Parlemen Korea Selatan Chung Sye Kyun mengatakan perbincangan kedua pimpinan dan delegasi parlemen berlangsung sangat lancar dan produktif. Diharapkan, ke depan Indonesia dan Republik Korea bisa saling melengkapi satu sama lain, sesuai dengan potensi masing-masing, dalam memajukan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. ■

(amr.mp), Foto: Nengfurgjbr

## Legislator Tolak Dana Setoran Haji untuk Infrastruktur

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menolak penggunaan dana setoran haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur oleh Kementerian agama.

Menurut Iskan, penggunaan dana setoran haji yang telah ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau instrumen sukuk itu harus sesuai peruntukannya dan harus melalui pembahasan dengan Komisi VIII DPR RI.

"Selama ini Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang telah di review oleh dewan syariah nasional (DSN) adalah sukuk ritel, dengan masyarakat memodali pembangunan infrastruktur. Namun terkait penggunaan dana setoran haji oleh Kementerian Agama, untuk itu, saya tidak tahu jangan-jangan Dewan Syariah Nasional (DSN) belum tahu,"



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis

kata Iskan di Jakarta, Kamis (05/01).

Selain itu menurut Politisi PKS dari Dapil Sumatera Utara I ini, penggunaan dana setoran haji yang tak sesuai

peruntukannya itu dilakukan tanpa sepengetahuan Komisi VIII DPR RI.

"Sampai saat ini, belum ada pembahasan antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII, apalagi persetujuan," papar Iskan.

Padahal, Iskan menambahkan bahwa penggunaan dana setoran haji yang tidak sesuai peruntukannya itu bisa menimbulkan masalah, di antaranya seperti kesulitan dalam menghitung ujuh (imbalan hasil) infrastruktur yang merupakan kewajiban negara.

"Jadi bagaimana sistem bagi hasilnya? Jangan sampai secara syar'i menjadi kabur sangat tidak layak kalau sesuai fatwa MUI," kata Iskan menambahkan. ■

(anp), Foto: Krenu/br

## Komisi IV DPR RI Audensi dengan DPRD Muaro Jambi

Anggota Komisi IV DPR RI Saniatul Lativa menerima audiensi anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Mereka menyampaikan keluhan-keluhan berkenaan dengan masalah pertanian, perikanan dan juga menyinggung soal cagar budaya. Saniatul mendorong supaya para anggota DPRD segera mengaktifkan dinas terkait, membuat surat, lalu keluhannya disampaikan kepada Komisi IV, supaya bisa ditindaklanjuti.

“ Ini merupakan hal penting yang harus kita tindak lanjuti, karena merupakan PAD (Pendapatan Asli



Anggota Komisi IV DPR RI, Saniatul Lativa

Daerah) terbesar bagi kabupaten Muaro Jambi. Kemudian masalah pertanian juga akan kita dorong, kita tindaklanjuti kita kawal dan kita kuatkan. Apa yang menjadi permasalahan mereka," ujar Saniatul di ruang Rapat Komisi IV, Rabu (11/01).

Saat menerima Anggota DPRD Jambi, turut hadir pula, Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, dan Anggota Komisi IV Ichsan Firdaus.

Saniatul memaparkan, karet dan sawit merupakan sektor pertanian yang menunjang perbaikan ekonomi masyarakat lokal. Namun yang menjadi kendala saat ini,

harganya belum stabil.

Apa lagi beberapa tahun lalu harganya sangat anjlok, namun akhirnya teratasi juga dan saat ini sudah mulai naik. "Kita harapkan tetap naik dan stabil, seperti yang diinginkan masyarakat," ungkap Saniatul.

Anggota Dewan dari Dapil Jambi ini menjelaskan kendala yang dihadapi saat ini adalah, pengolahan bahan baku karet yang suka numpuk. Selain itu harga karet menyesuaikan dengan harga dunia yang menyesuaikan dolar, sedangkan nilai tukar rupiah yang turun, berdampak pada harga karet. "Akhirnya karet juga ikut jadi korbannya," keluhnya. ■

(ekamp), Foto: Akbar/br

## Tindak Tegap Upaya Makar Kelompok OPM

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia harus lebih tegas terhadap kelompok apapun yang sudah tegas dan jelas menyatakan makar kepada NKRI, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

**H**al itu disampaikan Sukamta dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017, Selasa (10/01). "Kami ingin dari Komisi I menghimbau kepada pemerintah untuk bisa lebih tegas lagi kepada OPM



Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta

dan kelompok yang sudah tegas makar kepada NKRI. Perlu untuk ditindak karena sudah masuk ke ranah pidana bukan hanya statement," jelas Sukamta.

Politisi PKS ini menilai ada tiga persoalan utama yang menyebabkan OPM termasuk dalam kelompok yang jelas berbuat makar di NKRI. Pertama, terkait dengan pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne, Australia. Kedua, adanya pembakaran bendera Merah Putih oleh OPM yang bahkan di jejaring media sosial video (youtube) dan masih dibiarkan oleh pemerintah. Ketiga, adalah adanya perencanaan makar oleh OPM.

"Jangan sampai yang nyata-nyata makar dibiarkan, sementara ada orang yang baru dianggap punya rencana makar sudah ditindak. Jadi saya kira perlu tegas

terhadap siapapun yang menentang NKRI," tegas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Sebagaimana diwartakan, pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne tersebut dilakukan pada Jumat 6 Januari 2017 silam. Terjadi penerobosan (trespassing) oleh seseorang ke kantor perwakilan politik Indonesia di negeri Kangguru tersebut untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora OPM.

Selain itu, adanya anggota OPM menayangkan video pembakaran bendera Merah Putih yang diunggah di YouTube pada 26 Mei 2016 silam. Bahkan, Pimpinan Panglima Tinggi OPM Goliath Tabuni pada Minggu (8/1) silam telah menyatakan siap perang dengan militer Indonesia untuk Papua Merdeka. ■

(c.mph), Foto: Krenabhr

## Ketua Komisi I DPR RI Dukung Uji Kompetensi Wartawan

Maraknya peredaran berita dan informasi yang tidak jelas kebenarannya membuat resah masyarakat, rawan diprovokasi, bahkan bisa jadi diadu domba. Demi mengatasi masalah ini Dewan Pers akan melakukan uji kompetensi bagi wartawan Indonesia, menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memberikan dukungannya.

**S**ebab, dengan menjamurnya media *online* yang tidak terkontrol saat ini banyak berita-berita bohong atau palsu, yang marak disebut *hoax*, meresahkan masyarakat dan pemerintah.

"DPR RI mendukung upaya kompetensi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers tersebut untuk mengetahui siapa wartawan yang profesional dan yang abal-abal. Hanya saja DPR RI juga tidak menginginkan adanya intervensi antara media satu dengan yang lain," ujar politisi PKS, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (10/1).

Pernyataan tersebut dia sampaikan saat diskusi 'News or Hoax' bersama Menteri Kominfo RI Rudiantara, Ketua Dewan Pers Yosep Stanly Adi Prasetyo. Selain itu kata Haris, dengan uji



Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari

kompetensi tersebut agar masyarakat bisa membedakan mana berita yang *hoax* dan berita yang benar. "Hoax tidak bisa dibiarkan karena agama manapun melarang

membuat dan menulis berita bohong," papar Kharis.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menegaskan jika penutupan media *online* yang dilakukan oleh Kominfo RI tentu dengan alasan terkait isi, konten berita yang banyak provokasi, bohong dan *hoax*. Menurutnya masalah ini merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Sementara itu Ketua Dewan Pers Yosep Stanly Adi Prasetyo berpendapat bahwa media apa saja khususnya *online* harus berbadan hukum tetap (PT), memiliki penanggungjawab dan alamat yang jelas, serta menggaji wartawannya sesuai dengan upah minimum regional (UMR). ■

(eko.mph), Foto: Jaka

## Dewan Ingatkan Badan Siber Nasional Tidak Beban Keuangan Negara

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan rencana pemerintah membentuk Badan Siber Nasional (Basirnas) agar dikonsepsi secara komprehensif dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia dan tidak membebani keuangan negara.

“ Jika memang pemerintah memiliki tekad membentuk Badan Siber Nasional, silakan saja. Cuma saya mengingatkan agar badan baru itu tidak membebani keuangan negara, apalagi dengan menambah utang baru,” ujar Anang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (07/01).

Menurut Anang, badan baru yang akan dibentuk pemerintah dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada seperti program internet sehat yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Apalagi, imbuh politisi PAN ini, badan ini terdiri dari beberapa lembaga yang sudah tersedia seperti Lembaga Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Jadi semangatnya harus benar-benar efisien. Apalagi Presiden sejak awal memiliki komitmen untuk menghapus lembaga non struktural (LNS),” tegasnya.

Politisi asal Jember ini pun kembali mengingatkan bila Badan Siber Nasional ini akan bergerak terkait dengan berita hoax atau palsu sebenarnya jalan keluarnya cukup

dengan menerapkan penggunaan kartu identitas diri sebagai syarat mutlak memiliki akun di media sosial.

“Dengan KTP atau kartu identitas sebagai syarat untuk masuk di akun media sosial, ini akan memudahkan meminimalisir sekaligus melindungi pengguna media sosial,” paparnya.

Oleh karenanya, ia menyebutkan bila Badan Siber Nasional ini kelak terbentuk agar tidak hanya sekadar mengurus perkara *hoax* namun lebih dari itu juga menjadi embrio digitalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Misalnya, Badan Siber Nasional juga menyentuh digitalisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang saat ini masih amburadul. Badan Siber Nasional harus menyentuh sektor pendidikan yang memiliki aspek jangka panjang dan bernilai investasi jangka panjang,”

Di bagian lain, ia juga mengatakan daripada pemerintah membentuk Badan Siber Nasional lebih baik pemerintah



Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah

membentuk Badan Hak Karya Intelektual yang independen tidak lagi di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

“Dalam hemat saya, pemerintah lebih baik membentuk Badan Hak Karya Intelektual yang jelas-jelas dapat membantu pemasukan penerimaan negara di sektor karya intelektual. Ini sejalan dengan nawacita Presiden yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung baru,” pungkasnya. ■

(cs), Foto: Krenan/hr

## Zainudin Amali Dilantik Menjadi Ketua Komisi II DPR RI

Fraksi Partai Golkar melakukan rotasi kepemimpinan di tingkat alat kelengkapan dewan, salah satunya di Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II yang sebelumnya dijabat oleh Rambe Kamarulzaman, kini digantikan oleh Zainudin Amali. Proses pelantikan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dilakukan pada Selasa, (10/01) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“ Kami selaku pimpinan rapat meminta persetujuan,” ujar Fadli saat memimpin rapat. Anggota Komisi II yang hadir pun menyampaikan persetujuannya.

Setelah dilakukan proses pergantian, kini Komisi II dipimpin oleh Zainudin Amali dan tiga orang wakil, yaitu Ahmad Riza Patria (F-Gerindra), Lukman Edy (F-PKB), dan Almuzzammil Yusuf (F-PKS).

Zainudin Amali pun menyampaikan ucapan terima kasihnya. Politisi Golkar itu berharap kekompakan antar anggota Komisi II semakin erat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Tentu kita akan meneruskan program yang



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon melantik Pimpinan Komisi II DPR RI



sudah dicanangkan periode sebelumnya, dan kita akan menargetkan untuk 2017 ini kita akan baru koordinasikan dengan pimpinan lainnya," tutur Amali usai dilantik.

Amali pun menginginkan agar proses pembahasan RUU Pemilu yang *leading sector*nya ada di Komisi II, meskipun pembahasannya ada di tingkat Pansus.

Dengan demikian, maka persiapan penyelenggaraan pemilu bisa semakin lama.

"Kita ingin mempercepat, kenapa? Karena penyelenggara pemilu yang nanti akan bertugas, baik itu pileg dan pilpres. Karena hal ini sesuatu yang baru secara bersamaan pada tahun 2019 yang akan datang, maka persiapan penyelenggara itu

penting maka itu kami akan memberikan waktu yang seluas-luasnya," ujarnya.

Selain itu dalam waktu dekat, Komisi II juga akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ■

(hs), Foto: Jayadi/br.

## Kasus JP Morgan *Warning* atas Bencana Keuangan Negara

Pemutusan hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase terkait bank persepsi oleh Kementerian Keuangan, sebetulnya sudah lama disuarakan, agar pemerintah tak perlu banyak melibatkan bank-bank asing untuk menampung dana pengampunan pajak. Kasus ini adalah *warning* atas potensi bencana keuangan nasional.

“ Heri Gunawan Anggota Komisi XI DPR RI mengemukakan hal tersebut dalam rilis yang diterima Parlemen, Jumat (6/1). "Jauh-jauh sebelumnya kami sudah mengingatkan pemerintah terkait risiko yang terjadi akibat dilibatkannya bank-bank asing untuk menampung dana *tax amnesty*. Kita sudah ingatkan pemerintah untuk belajar tentang risiko keuangan dan guncangannya dari kejadian yang mirip di masa lalu."

Pemerintah diimbau politisi muda Partai Gerindra ini, agar mencari cara dan jalan berpikir lain yang lebih nasionalis. Seperti diketahui, pemutusan itu terkait dengan hasil riset bank investasi asal AS tersebut yang dinilai berpotensi

menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional. Hasil riset itu menyebutkan, JP Morgan menggeser rekomendasi portfolionya, menurunkan Brazil dari *overweight* ke netral, menurunkan Indonesia dari *overweight* ke *underweight*, dan Turki dari netral ke *underweight*.

Tak ada penjelasan dari JP Morgan mengapa merekomendasikan *downgrade* atas Indonesia. Dikatakan Heri, bila membaca hasil risetnya, ada kekhawatiran di pasar obligasi yang pertumbuhannya lebih cepat dan defisit lebih tinggi. Peningkatan volatilitas ini bisa meningkatkan premi risiko di negara berkembang seperti Indonesia yang berpotensi menghentikan dan membalikkan aliran modal ke *fixed income* negara berkembang, bukan bicara besar kecil dan signifikannya.

Ditambahkan Heri, di balik kasus ini, ada kekhawatiran lain terkait tingginya tekanan sosial di Jakarta. Pada tahun 2016, investor asing melakukan aksi beli di pasar saham Indonesia sebesar 2,4 miliar dolar AS. Ini tentu pertanda yang tidak baik bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Apalagi banyak dana hasil pengampunan pajak yang disimpan di situ. "Pemerintah harus memperhatikan betul performa bank-bank asing, bahkan perbankan swasta nasional kita," ucap Heri.

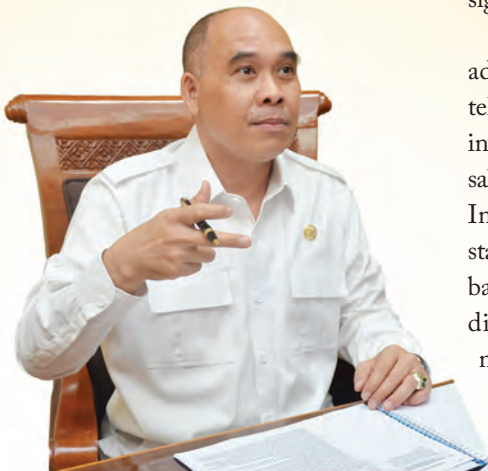
Politisi dari dapil Jabar IV itu mengatakan, ada yang perlu dicermati

sekaligus disikapi pemerintah terkait JP Morgan. Hasil riset JP Morgan harus jadi *warning* buat pemerintah bahwa potensi gangguan sistem keuangan sedang mengancam kita. Harus dipastikan bahwa JP Morgan tidak lagi menerima setoran penerimaan negara dari siapapun di seluruh cabang JP Morgan. Perlu dilakukan penyelesaian segera atas perhitungan hak dan kewajiban terkait pengakhiran penyelenggaraan layanan JP Morgan Chase sebagai bank persepsi.

Selanjutnya, sambung Heri, perlu ada sosialisasi masif kepada publik terkait pemutusan kontrak kerja sama tersebut. Selain itu, perlu ada evaluasi terhadap bank-bank asing maupun perbankan swasta nasional yang berperan sebagai bank persepsi. Sebab, tidak menutup kemungkinan potensi dan risiko serupa bisa terjadi di bank-bank asing dan swasta nasional lainnya. "Kalau sekelas JP Morgan saja bisa terkena imbas apalagi yang lainnya."

Yang tidak kalah pentingnya, perlu ada peninjauan dan evaluasi terhadap dana-dana hasil pengampunan pajak yang disimpan di bank-bank asing dan perbankan swasta nasional lainnya. Dasar hukumnya juga dinilai tidak terlalu kuat, karena hanya ditopang oleh peraturan sekelas Peraturan Menteri Keuangan (PMK), imbuh Heri mengakhiri rilisnya. ■

(mb), Foto: Aska/br.



Anggota Komisi XI, Heri Gunawan

## Legislator Tagih Janji Pemerintah Ciptakan 10 Juta Lapangan Pekerjaan

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf melalui forum rapat paripurna yang digelar hari Selasa, 10 Januari 2017 menyampaikan beberapa hal yang amat genting bagi stabilitas Indonesia pada tahun 2017 yaitu beban hidup rakyat yang semakin berat.

**D**ede mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat, tapi realitanya tidak sesuai harapan. Data BPS 2016 menyebutkan angka pengangguran masih tetap tinggi yaitu 7 juta orang.

"Melalui forum terhormat ini DPR RI harus mengingatkan pemerintah bahwa janji menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan merupakan prioritas yang sangat penting. Karena pengangguran menyebabkan kemiskinan, instabilitas keamanan, rentannya gesekan horizontal di masyarakat," katanya saat rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut Legislator partai Demokrat ini mengatakan jutaan orang yang menganggur jika tidak segera mendapatkan pekerjaan akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah menyebarkan berbagai *hoax* di media sosial.

"Orang yang menganggur adalah orang yang lapar, mereka mudah termakan oleh berbagai *hoax*. Maka percuma jika pemerintah gencar memerangi *hoax* tapi tidak gencar menyelesaikan pengangguran," ungkapnya.

Dede juga menyampaikan terkait merebaknya berbagai temuan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berpaspor sebagai turis dan membuat rakyat khususnya mereka yang menganggur menjadi panik dan kuatir semakin sulit mendapat pekerjaan.

"Kami menyambut baik langkah pemerintah membentuk Satgas sebagaimana rekomendasi Panja yang dibentuk Komisi IX DPR RI, namun perlu juga pahami bersama bahwa persoalan mendasar dari keresahan rakyat saat ini adalah masih sulitnya mendapatkan pekerjaan," ia mengingatkan.

Menurut data BPS 2016, penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun dari 40,12 juta orang menjadi 38,29 juta orang begitu pula yang bekerja di sektor industri juga

mengalami penurunan dari 16,38 juta orang menjadi 15,97 juta orang. Artinya, lanjut Dede, sektor pertanian dan industri tidak mampu lagi menyerap para pengangguran. Ini kondisi bahaya karena semestinya pengangguran bisa terserap di kedua sektor tersebut

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini juga menyoroti fenomena yang dinilainya mengkhawatirkan yaitu makin banyaknya



Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf

sarjana yang menganggur. BPS menyebutkan tingkat pengangguran lulusan universitas pada 2016 meningkat 5,34 persen menjadi 6,22 persen. Akibatnya banyak sarjana yang terpaksa menjadi sopir transportasi *online* demi menyambung hidup.

Persoalan utama adalah karena pemerintah belum mampu menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat sebagaimana yang pernah dijanjikan.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah lapangan pekerjaan untuk rakyat kita sendiri, bukan lapangan pekerjaan untuk rakyat negara lain. Jika pemerintah tidak bisa segera menepati janji 10 juta lapangan sangat dikuatirkan akan memicu gejolak masyarakat karena mereka tidak menjadi tuan di negaranya sendiri," ungkapnya.

Pimpinan Komisi IX ini meminta agar persoalan TKA ilegal tidak dianggap sepele karena jika tidak ditangani secara serius maka lapangan pekerjaan akan direbut oleh pekerja asing sehingga rakyat kita yang menganggur dan semakin tersisih," pungkasnya. ■

(mm,mp), Foto: Rizka/hr

## Australia Harus Tindak Pelaku Penerobosan KJRI Melbourne

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar meminta otoritas resmi Australia menindak pelaku penerobosan (*trespassing*) ke KJRI Melbourne.

“ Peristiwa Ini memberikan pesan kepada Pemerintah Indonesia, adanya upaya Kelompok-kelompok di Australia yang berusaha melakukan proses internasionalisasi Isu Papua secara massif dan terencana,” ucap Rofi Munawar Minggu (08/01) di Jakarta.

Hal itu diungkapkannya menanggapi

bendera Papua Merdeka, Bintang Kejora, mendadak dikibarkan oleh seseorang di KJRI di Melbourne, Jumat (06/01). Menurut Rofi, tindakan penerobosan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bukti adanya hubungan baik dengan Indonesia, sudah semestinya

## Ketersediaan Listrik di Kaltara Cukup

Tim Kunker Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Azam Azman Natawijana meninjau PLTD/G Gunung Beluh Tarakan, Selasa (20/12). Kunjungan ini dijadikan kesempatan untuk memberikan solusi atas permasalahan listrik di Tarakan.

“ Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono, mengatakan ketersediaan listrik di wilayah Kaltara terbilang cukup. Persediaan listrik sekarang mencapai 125 MW, namun yang digunakan baru mencapai 60 MW di seluruh Kaltara.

Menurutnya, Kaltara juga sudah mengantisipasi ketersediaan listrik dengan menumbuhkan wilayah industri. "Industri yang akan dibangun sangat membutuhkan energi listrik. Yang baru kami dengar sudah ada ketersediaan listrik sebesar 9.000 MW dengan tenaga hydro atau air yang diusahakan oleh PLN bersama dengan pihak swasta untuk merealisasikan kebutuhan listrik," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengakui akan terus memantau PLN terkait elektrifikasi di wilayah Kaltara, lantaran hingga saat ini baru sekitar 65 persen warganya yang sudah teraliri listrik. Dalam dua tahun ke depan, politisi asal Dapil Jawa Timur berharap pemenuhan aliran listrik kepada seluruh warga Tarakan akan segera rampung menjadi 100 persen.



Tim Kunker Komisi VI DPR RI meninjau PLTD/G Gunung Beluh Tarakan

"Elektrifikasi hingga saat ini masih menjadi tugas PLN. Kami juga sudah memprioritaskan listrik kepada Tarakan karena Tarakan sudah menjadi pusat perekonomian dan pelayanan PLN (Persero) harus jauh lebih baik dari sebelumnya, serta tidak ada lagi pemadaman listrik," jelasnya.

Disinggung tentang transmisi PLN ke pusat, politisi Partai Gerindra ini berharap harganya harus lebih murah. "Kalau anak (perusahaannya) pelayanan bisa bagus, bapaknya juga harus lebih bagus. Kan tadinya Rp1.300,- atau 11 sen, itu saya rasa nasional,

jadi diharapkan tidak sering mati hidup lagi," ucapnya.

Terkait lebih mahalnya harga gas dibanding batu bara, Komisi VI akan terus mendorong PLN untuk bisa mengusahakan bahan bakarnya. Karena Indonesia adalah penghasil gas terbesar, seharusnya harganya bisa lebih murah.

General Manager PLN Kaltimra (Kalimantan Timur, Kalimantan Utara), Tohari Hadiat mengaku bahwa seringkali listrik mati hidup di Tarakan bukan masalah mesinnya, tapi bahan bakarnya. "Siapa yang bisa menjamin gas yang keluar dari bumi itu lancar terus," ujarnya.

Untuk itu Tohari berusaha menyiapkan bahan bakar alternatif kedua, yaitu solar. Namun, karena solar lebih mahal maka Tohari akan berusaha menambah mesin. "Bahan bakar gas tetap akan jadi prioritas karena lebih murah, tapi jika tidak ada ya kita pakai solar saja. Saya juga berharap agar penyediaan listrik di Tarakan tidak akan berkurang dan selalu mencari solusi yang ada," tutupnya. ■

(ru)/foto:ivan armanias/rw.

Australia menindak tegas pelaku penerobosan pada kantor perwakilan politik Indonesia yang ada di negeri Kangguru tersebut

Rofi pun menambahkan, kejadian ini menambah rentetan peristiwa internasionalisasi Isu Papua oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga, hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah.

"Proses identifikasi isu - isu Papua harus ditempatkan secara proporsional dan dikomunikasikan secara massif dan intensif kepada masyarakat internasional, untuk menghadirkan perimbangan Informasi dan penguatan diplomasi Indonesia," tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini.

Diketahui, sebelum kejadian ini, di awal September 2016 silam, perwakilan dari enam negara di Pasifik membahas kekhawatiran akan keadaan di Papua Barat dalam forum PBB.

Dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13 - 26 September itu, para pemimpin keenam negara tersebut mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua yang cenderung mendiskreditkan Indonesia.

Keenam negara tersebut adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu. ■



Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi Mumarwar

(mp), Foto: Iwan/rw.

## Kenaikan Tarif STNK dan BPKB Tidak Tepat

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menilai kenaikan tarif pengurusan BPKB dan STNK kurang tepat disaat masyarakat sedang menghadapi tingginya biaya hidup seperti kenaikan tarif dasar listrik, BBM hingga cabai. Hal itu diungkapkan dalam rilis yang diterima Parlemen pada Jumat, (06/01).

“Kenaikan tarif pengurusan BPKB dan STNK pada saat ini sepertinya kurang tepat. Karena masyarakat sedang menerima berbagai kenaikan biaya hidup, seperti kenaikan TDL, BBM hingga harga cabai. tentunya kenaikan PNPB kendaraan akan menambah beban biaya hidup masyarakat,” jelasnya.

Politisi PKS ini menjelaskan kenaikan tarif tersebut harus dijadikan koreksi, sebaiknya itu dilakukan secara berkala agar masyarakat tidak kaget dengan besarnya nilai kenaikan biaya tersebut. Ia juga menuturkan jika alasannya adalah kenaikan material, maka patut dipertimbangkan nilai ekonomis biaya produksinya.

"Bilapun alasannya adalah kenaikan material, seharusnya dipertimbangkan nilai keekonomian biaya produksinya. misalkan saja pencetakan selebar STNK, masyarakat tentu mempertanyakan, apakah memang biayanya sampai 200 ribu.

Demikian pula untuk pencetakan buku BPKB kendaraan, apa memang biayanya sampai dengan 375 ribu," jelas Aboe.

Ia pun menjelaskan seharusnya kenaikan itu dipatok juga angka psikologisnya agar tidak menjadi beban untuk masyarakat. "Adapun bila targetnya adalah pendapatan negara bukan pajak, untuk menaikkan pemasukan negara. seharusnya dipatok angka psikologis yang bijak sehingga tidak menjadi beban untuk masyarakat," tuturnya.

Politisi Dapil Kalimantan Selatan I ini pun juga meminta kepada Kepolisian untuk juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses pengurusan STNK dan BPKB. "Diluar itu semua, kenaikan biaya pengurusan tersebut tentunya harus diimbangi dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selama ini pelayanan pengurusan STNK dan BPKB di beberapa daerah masih dilihat sebagai momok oleh

masyarakat," terangnya.

Selain itu, pada beberapa waktu terakhir pencetakan STNK ataupun BPKB bisa berbulan-bulan dengan alasan kehabisan bahan. Tentu hal ini membawa situasi yang tidak nyaman untuk masyarakat dan harus diperbaiki," tutup Aboe. ■



Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi

(b), Foto: Andri/br

## Pimpinan Komisi IV DPR RI Sidak Harga Cabai di Pasar Palmerah

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron melakukan sidak di Pasar Palmerah Jakarta terkait kenaikan harga jual cabai yang tinggi dan mengakibatkan keresahan di masyarakat. Dalam sidak tersebut Herman mendapatkan harga jual cabai besar dalam kisaran harga antara 50 ribu Rupiah sampai dengan 55 ribu per kg.

Demikian juga dengan harga cabai keriting harganya hampir sama yakni 50 ribu rupiah sampai dengan 55 ribu rupiah per kg. Sedangkan harga cabai rawit di pasar Palmerah tersebut seharga 140 ribu per kg.

Ini adalah rangkaian dari hari-hari terakhir dimana harga cabai melambung tinggi. Saya sudah mengecek langsung ke Dirjen Hortikultura, bahwa di daerah-daerah produksi sebetulnya memproduksi secara normal, dan harga di daerahpun awal harganya normal. Tetapi ketika kemudian harga pasar ini naik, maka sekarang harga di tingkat petani juga

sudah naik," papar Herman di Pasar Palmerah Jakarta, Rabu (11/01).

Menurutnya, untuk harga tersebut dapat turun dengan segera, sepertinya memang butuh waktu. Karena ada korelasi antara distribusi terhadap harga dipasar. Kalau budi dayanya cukup untuk suplai di pasar, tetapi harga di pasar cukup tinggi, berarti ada aspek distribusi yang harus betul-betul dikawal dengan baik.

"Karena rangkaian kenaikan harga dipasar menyebabkan harga di tingkat petani menjadi cukup tinggi, maka harus ada *treatment* khusus dari pemerintah agar dapat menurunkan

kembali harga di tingkat petani pada harga yang lebih rasional," ujarnya.

Herman menjelaskan, harga patokan pemerintah untuk pembelian ditingkat petani seharga 15 ribu rupiah, tetapi dengan situasi seperti ini, maka harga patokan tidak lagi menjadi sebuah patokan harga di masyarakat atau di pasar. Rentang harga di pasar yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan antara 15 ribu rupiah sampai dengan harga 27 ribu rupiah. Seandainya harga jual cabai mencapai 30 ribu rupiah saja masih termasuk rasional.

"Kalau melihat situasi harga cabai pada saat ini, maka solusinya tentu tidak bisa

dilakukan secara parsial budi daya saja, harus ada yang mengurus distribusi. Sementara faktor distribusi ini juga dipengaruhi oleh libur panjang Hari Natal dan Tahun Baru," ucap politisi Demokrat itu.

Ia menyatakan, kalau tidak segera disiapkan lembaga atau institusi pemerintah dalam melaksanakan distribusi, maka dikhawatirkan pada *event-event* tertentu seperti pada hari besar keagamaan, dimana sebagian besar pelaku usaha tidak melakukan distribusinya, maka hal ini akan jadi pemicu kenaikan harga.

"Kalau harga sudah naik di pasar, maka



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron meninjau Pasar Palmerah

akan diikuti dengan kenaikan di tingkat petani.

Oleh karenanya harus ada solusi yang

komprehensif, yakni dijaga ditingkat produksi dan distribusinya sampai pada tingkat pasar. Sehingga harga acuan yang ditetapkan di tingkat petani maupun pasar oleh pemerintah akan terkawal dengan baik.

Dari pantauan langsung di pasar Palmerah Jakarta, Herman melihat bahwa suplai komoditinya normal tetapi harganya yang tidak normal. Harga cabai besar dan cabai keriting naik 100 persen, dan harga cabai rawit merah naik 300 persen. "Harus ada solusi

komprehensif antara budi daya, suplai, dan distribusi," pungkasnya. ■

(dep.mip), Foto: Jayanti/br

## Pemerintah Jangan Saling Lempar Tanggungjawab Soal Kenaikan Biaya STNK

Anggota Komisi XI DPR RI yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menyesalkan kenaikan biaya pengurusan STNK yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah. Ecky juga meminta untuk berhenti saling lempar tanggung jawab atas soal tersebut.

“ Kenaikan biaya pengurusan STNK sebesar 2 hingga hampir 3 kali lipat itu tidak masuk akal dan membebani rakyat. Sebab kepemilikan kendaraan bermotor khususnya roda dua didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Terlebih pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan ini” ujar Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (06/01).

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat PP 60/ 2016 menaikkan biaya pelayanan STNK maupun BPKB baru dan perpanjangan bervariasi dari 2 kali hingga hampir 3 kali lipat. Kebijakan ini berlaku efektif per 6 Januari 2016. Sementara data dari GAIKINDO kepemilikan motor di Indonesia mencapai 260 buah per 1000 penduduk. Banyak di antaranya dimiliki oleh penduduk kelas menengah ke bawah.

Menurut Ecky, Pemerintah tidak punya alasan kuat untuk menaikkan tarif yang fantastis itu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini pada dasarnya untuk menutup biaya barang atau jasa yang digunakan dalam pelayanan.

Pemerintah mengatakan dalam enam tahun belum melakukan penyesuaian tarif sehingga perlu disesuaikan terhadap inflasi.

"Jika ini alasannya, bisa kita hitung dan semestinya hanya 25-30 persen. Kenaikan hingga 2-3 kali lipat tidak bisa dijustifikasi," tegas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Jika tujuannya adalah menggenjot penerimaan negara, sambung Ecky, mestinya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa keadilan. "Sementara masyarakat menengah ke atas diberikan fasilitas pengampunan pajak, masyarakat menengah ke bawah malah dibebani tambahan pungutan seperti ini. Kesannya dengan kenaikan ini pemerintah sudah kehabisan akal untuk menaikkan penerimaan negara yang dua tahun ke belakang selalu defisit," ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Oleh karena itu, Ecky menilai wajar masyarakat menengah ke bawah merasa kecewa, sebab secara bersamaan juga ada kenaikan BBM dan TDL karena kebijakan pembatasan subsidi, sementara harga-harga



Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam

seperti cabai mulai merangkak naik.

"Di saat seperti ini ironisnya pemerintah malah saling lempar tanggung jawab di media. Antara Presiden yang mempertanyakan kenaikan tarif padahal beliau sudah menandatangani PP-nya, serta Menteri Keuangan dan Kapolri yang satu sama lain mengelak bahwa kenaikan ini karena usulan mereka. Pemerintah harus bisa menjelaskan dan mempertanggung jawabkan kenaikan ini," tandas Ecky. ■

(mp), Foto: Azhar/br

## Plt Sekjen DPR RI Lantik Pejabat Eselon III dan IV

Dinamika yang ada pada lembaga DPR RI menuntut Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan DPR RI untuk melakukan perubahan. Hal tersebut diungkapkan Plt Sekjen DPR RI, Achmad Djuned usai melantik pejabat eselon III dan IV di tubuh Setjen DPR RI dan BKD.

**M**utasi dan promosi kali ini semata-mata karena adanya dinamika yang ada pada lembaga DPR RI. Oleh karena itu dibutuhkan perubahan dalam sebuah organisasi. Selain itu adanya kebutuhan organisasi terhadap pembinaan karir pegawai. Pembinaan karir pegawai juga harus kita perhatikan untuk pemantapan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan BKD DPR RI secara keseluruhan. Disini, dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan BKD DPR RI baik terhadap Anggota Dewan, maupun tugas-tugas kepada pelayanan publik harus meningkat," ujar Djuned di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/1).

Ditambahkan Djuned, administrator di Sekjen DPR RI dan Pengawas di BKD DPR RI merupakan ujung tombak dari DPR RI. Jika diibaratkan keduanya merupakan Koki. Koki atas kebijakan yang ada di DPR RI. Apakah nantinya "masakan" itu enak atau tidak, seutuhnya ada di tangan administrator dan Pengawas. Oleh karena itu ia berharap agar seluruh pejabat yang baru saja dilantik dapat meningkatkan kompetensi, loyalitas dan tanggung jawab terhadap NKRI.

Diingatkannya juga bahwa pejabat Sekjen dan BKD DPR RI bekerja di sebuah lembaga politik. Namun keduanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus bersikap netral di lembaga politik ini. Djuned, yang



*Suasana Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Setjen DPR RI*

mengaku akan memasuki masa pensiun pada Oktober 2017 mendatang juga berharap bahwa pejabat yang baru saja dilantik itu harus mampu bekerjasama dan berkoordinasi yang baik dengan teman-teman seprofesinya, atasan atau pimpinan, serta bawahan. Karena suksesnya sebuah pekerjaan adalah jika pejabat tersebut mampu bekerjasama dengan baik terhadap seluruh elemen tersebut.

Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan, Djaka Dwi Winarko menjelaskan bahwa pergantian hal yang biasa, dan khusus pergeseran dan pergantian yang ada di lingkungan Biro Pemberitaan parlemen, ia berharap hal tersebut akan menjadi sebuah "darah baru". Karena ke depan Biro Pemberitaan Parlemen tantangannya semakin berat. Dengan demikian diharapkan pemberitaan mengenai DPR RI semakin baik, liputan-liputannya semakin bagus. Sehingga

kinerja yang dilakukan dewan bisa sampai ke masyarakat, dan masyarakat dapat memahami betul apa yang dilakukan oleh Anggota Dewan. Pada akhirnya akan tumbuh kepercayaan terhadap Anggota Dewan.

Berikut nama-nama pejabat yang mengalami promosi dan mutasi jabatan baru di lingkungan Sekjen DPR RI dan BKD DPR RI, Rini Koentarti sebagai Kepala Bagian Tata Usaha BKD, Dadang Prayitna sebagai Kepala Bagian Humas DPR RI, Sigit Bawono Prasetyo sebagai Kabag Sekretariat Ketua DPR RI, Tri Hastuti sebagai Kasubbag Pelayanan Informasi Publik Bagian Humas, Hernadi sebagai Kasubbag TU Sekretariat Komisi VIII, Wazir sebagai Kasubbag Rapat Sekretariat BURT, Fauzi Hendarmin sebagai Kasubbag Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dewan, Martaya sebagai Kasubbag Penyimpanan dan Pendistribusian Bagian Persuratan dan Penyimpanan.

Sementara itu Sugeng Irianto menjabat sebagai Kasubbag Media Cetak Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Ermita Ardem sebagai Kasubbag Teknik Televisi Bagian Televisi dan Radio Parlemen, Ade Efendi sebagai, Kasubbag Penyaluran Delegasi masyarakat bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat. Dedi sebagai Kasubbag Administrasi Pengamanan Bagian Pengamanan Dalam, Achmad Sofian Bahtiar sebagai Kasubbag Kerumahtanggaan Bagian Sekretariat Ketua, Martiasih Nursanti sebagai Kasubbag Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sekretariat Jenderal dan BKD DPR RI, Bayu Setiadi sebagai Kasubbag Program dan Produksi Televisi dan Radio Parlemen. ■

*(Ayu), foto: Rizka/br*



Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Pemilu saksikan peragaan E-voting

## DPR RI Nilai E-Voting Tingkatkan Kualitas Pemilu

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu Yandri Susanto mengatakan penerapan sistem *voting* berbasis teknologi atau *e-voting* jelang Pemilihan Umum 2019 merupakan suatu langkah maju untuk meningkatkan kualitas pemilu.

“Yah, kita dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu dengan mengurangi berbagai modus kecurangan karena tidak akan ada pemilih fiktif, pemilih ganda maupun kecurangan masif lainnya walaupun masih ada beberapa kelemahan,” ujar politisi PAN itu usai melakukan simulasi *e-voting* di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/01). Hadir dalam acara ini BPPT, PT Inti dan Kominfo serta ITB.

Lebih lanjut, Yandri mengatakan saat ini Pansus tengah mengumpulkan masukan dari akademisi untuk mengkaji lebih lanjut terkait teknologi yang paling tepat digunakan. Sebelumnya, keinginan untuk menerapkan sistem *e-voting* berdasarkan berbagai pertimbangan, diantaranya bisa menekan biaya pemilu.

"Kalau mendengar pemaparan tadi bisa menekan biaya sampai 50 persen, itu yang mesti kita pikirkan. Artinya dari beberapa info, menurut kami perlu diberi ruang untuk dimulainya *e-voting* pada pelaksanaan pemilu 2019," tuturnya.

Selain itu, saat ditanyai kesiapan masyarakat untuk diterapkannya sistem *e-voting*, ia menilai sosialisasi akan berjalan dengan mudah mengingat nantinya masing-masing calon akan berlomba-lomba untuk menjelaskan mekanisme *e-voting* kepada calon pemilihnya.

"Harus dimulai, apakah itu sebagian besar atau sebagian kecil misalnya apakah pulau Jawa, Sumatera, atau sebagian wilayah Indonesia Timur dulu. Artinya, perlu ada kerjasama dan komitmen

semua pihak pemerintah maupun Mendagri sesuai dengan UU yang mengamanatkan penggunaan KTP konvensional pada 2018. Nah, kalau semua sudah e-ktp masa kita tidak mau *e-voting*," imbuh Yandri.

Ketua Pansus Lukman Edy juga menilai masyarakat telah siap untuk memilih dengan menggunakan teknologi *e-voting*. Hal itu terlihat dari banyaknya Pilkades yang menerapkan teknologi tersebut sejak 2009 hingga 2015. "Artinya, masyarakat di tingkat bawah sudah terbiasa," ujar Lukman.

Menurutnya, justru persoalannya yaitu penyelenggara pemilu yang belum siap. Beberapa kali Komisi II membahas Pilkada namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu mengatakan tidak siap, karena itu perlu didorong agar selangkah lebih maju ke depan.

"Indonesia itu luas, terdiri dari banyak pulau, jadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai persoalan kepemiluan yaitu dengan *e-voting*," ungkap politisi dari F-PKB itu.

"Ada tiga opsi, pertama kita tolak *e-voting* dan tetap menggunakan sistem manual. Kedua, secara maksimal menggunakan *e-voting* pada pemilu 2019. Ketiga, terbatas di beberapa daerah yang disebut peralihan. Sampai kita targetkan 2024 sudah harus gunakan *e-voting* sehingga pilkada 2018 bisa dijadikan latihan," tambah Lukman. ■

(amw/pt). Foto: Kresna/br



# LENSA PARLEMEN



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi sejumlah Anggota DPR RI menerima kunjungan Ketua DPR Korea Selatan di Gedung DPR RI, Kamis (12/1). Foto: Naefuroji



Pimpinan DPR RI menerima audiensi para ulama perihal perubahan bentuk logo BI pada uang baru yang diduga mirip logo PKI di Ruang Pertemuan Pimpinan, Rabu (11/1). Foto: Runi



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain didampingi sejumlah Anggota Komisi VIII menemui para pendemo yang tergabung dalam PGSI terkait tunjangan sertifikasi guru yang belum terbayarkan, Rabu (11/1). Foto: Runi

